



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUNG SUGANDA
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 622610

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 8.168.599.929**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 860.602.080
2. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.044.035.000
3. Tanah Seluas 712 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 907.608.966
4. Tanah Seluas 6536 m2 di KAB / KOTA INDRAMAYU, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 62.345.792
5. Tanah Seluas 6780 m2 di KAB / KOTA INDRAMAYU, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 46.483.910
6. Tanah Seluas 9112 m2 di KAB / KOTA INDRAMAYU, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 92.350.181
7. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/206 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 4.155.174.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 631.800.000**

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 495.000.000



3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
1.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 187.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 230.525.398

F. HARTA LAINNYA Rp. 178.038.582

Sub Total Rp. 9.396.463.909

III. HUTANG Rp. 3.024.139.200

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.372.324.709

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.